BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Latar Belakang

PT.PLN (PERSERO) mempunyai kisah awal tentang bagaimana sejarah PLN berdiri pada penjajahan Belanda, Penjajahan Jepang sampai Proklamasi kemerdekaan.sejarahnya sebagai berikut :

2.1.1 Masa Penjajahan Belanda

Tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang Tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik baik milik pemerintah daerah otonomi (Gamente) maupun swasta

Di Bandung atau di Jawa Barat perusahaan yang mengelola tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu **Bandoengsche Electricit Maatschappij** (BEM)
Yang berdiri tahun 1920 Berdirilah perusahaan perseroan **Gemenschapplijk Electicitiet bedrijfvoor Bandoeng** (GEBEO)yang menggantikan BEM dengan akte pendirian notaris Pada tanggal 31 Desember 1919.

Tahun 1942 – 1945 pada penjajahan jepang. Pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan di jawa Djigyo sha Bandoeng Shi Sha wilayah kerja diseluruh pulau jawa.

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mengalami periode perjuangan yang sangat hikmat sehingga penjajah menyerahkan kedaulatan sepenuhnya dari pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1957 Indonesia mulai awal mengelola pelistrikan di Indonesia karena pada tahun tersebut mulai bermunculan perusahaan listrik asing di Indonesia.maka pada tahun 1957 tepatnya padan tanggal 27 Desmber GEBEO diambil alih oleh Indonesia dengan peraturan pemerintah No.18 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 membentuk suatu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BUPLN) Sesuai dengan peraturan pemerintah No . 67

Tahun 1961. PLN Exploitasi XI menggantikan istilah PLN Bandung Sebagai kesatuan BPUPLN Jawa Barat Kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara , menyebutkan bahwa status Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan peraturan Mentri PUJL No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1975 tentang Organisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI No 05/DIII/SEK/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah RI No.23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan Perusahaan Listrik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka bentuk Perusahaan umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dengan sebutan PT.PLN (PERSERO) Unit Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai dengan Akta Pendirian.

menyediakan tenaga listrik baik milik pemerintah daerah otonomi (Gamente) maupun swasta.Di Bandung atau di Jawa Barat perusahaan yang mengelola tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu **Bandoengsche Electricit Maatschappij** (BEM)
Yang berdiri tahun 1920 Berdirilah perusahaan perseroan **Gemenschapplijk Electicitiet bedrijfvoor Bandoeng** (GEBEO)yang menggantikan BEM dengan akte pendirian notaris Pada tanggal 31 Desember 1919.

2.1.2 Masa Penjajahan Jepang

Tahun 1942 – 1945 pada penjajahan jepang. Pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan di jawa Djigyo sha Bandoeng Shi Sha wilayah kerja diseluruh pulau jawa.

2.1.3 Setelah Proklamasi Sampai Sekarang

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mengalami periode perjuangan yang sangat hikmat sehingga penjajah menyerahkan kedaulatan sepenuhnya dari pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1957 Indonesia mulai awal mengelola pelistrikan di Indonesia karena pada tahun tersebut mulai bermunculan perusahaan listrik asing di Indonesia.maka pada tahun 1957 tepatnya padan tanggal 27 Desmber GEBEO diambil alih oleh Indonesia dengan peraturan pemerintah No.18 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 membentuk suatu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BUPLN) Sesuai dengan peraturan pemerintah No . 67 Tahun 1961. PLN Exploitasi XI menggantikan istilah PLN Bandung Sebagai kesatuan BPUPLN Jawa Barat Kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara , menyebutkan bahwa status Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan peraturan Mentri PUJL No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1975 tentang Organisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI No 05/DIII/SEK/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah RI No.23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan Perusahaan Listrik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka bentuk Perusahaan umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dengan sebutan PT.PLN (PERSERO) Unit Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai dengan Akta Pendirian.

2.1.1 **Misi dan Visi PT. PLN (Persero).**

Pemerintah membentuk dan mendirikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk membantu pemreintah dalam pelayanan kepada masyarakat .

Maksud dan tujuan pendirian PT PLN adalah :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk berdasarkan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
   a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong pningkatan kegiatan ekonomi.
   b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menjunjung usaha penyediaan tenaga listrik sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

a. Misi PT. PLN (Persero). adalah :

1. **Fungsi Bisnis/ Memupuk Keuntungan.**

   Sebagai Badan Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan kaidah bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang.

2. **Fungsi Sosial/ Agen Pembangunan.**

   Sebagai pelaksana pembangunan, melakukan kegiatan baik yang bersifat program pembangunan sebagaimana layaknya, maupun yang bersifat sosial dan perintis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan.

b. Visi PT PLN (Persero) adalah :

1. Maju. , dengan pengertian harus mempunyai wawasan bisnis yang mencerminkan unsur-unsur kompetitif, efisien dan produktif.
2. Modern , memamfaatkan teknologi maju untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kerja.
3. Mandiri , mampu menetukan arah dan kebijakan untuk melaksanakan misi yang diembannya.

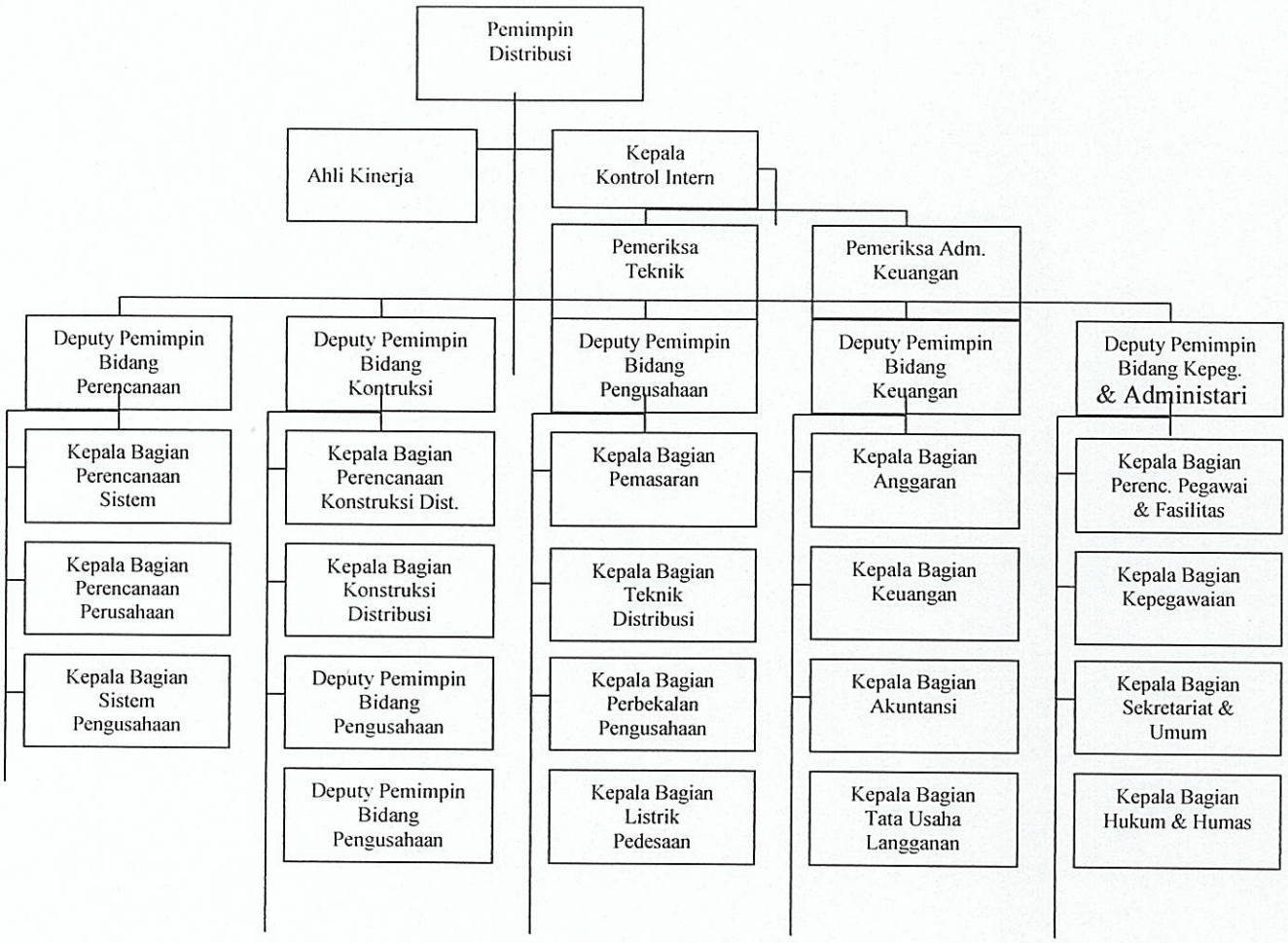
2.3 Struktur Organisasi

Gambar 3.1.

Bagan Organisasi PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM



PT PLN (Persero) Distribusi Jawa barat dipimpin oleh Pemimpin Distribusi yang kedudukannya setingkat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) yang membawahi Deputy - Deputy dalam tugasnya dengan dua Staf pembantu yaitu Ahli Kinerja dan Kepala Kontrol Intern

Ringkasan Uraian Tugas dalam Bagan Organisasi

1. Ahli II Kinerja

Melaksanakan pembinaan penerapan Pengendalian Mutu Terpadu (PMT) serta menjabarkan indikator-indikator kinerja perusahaan, dan menyusunnya menjadi konsep pengukuran kinerja unit pelaksana induk dan unit pelaksana sebagai alat ukur kemajuan dan prestasi perusahaan.

2. Deputy Pemimpin Bidang Konstruksi

Mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan serta mengarahkan kegiatan konstruksi sesuai dengan kebijakan perusahaan.

3. Deputy Pemimpin Bidang Keuangan

Menyusun dan memantaqu anggaran pendapatan dan belanja, mengelola keuangan dan akuntansi pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian, membina tata usaha langganan dan penjualan tenaga listrik serta menyusun laporan keuangan.

4. Deputy Pemimpin Bidang Kepegawaian dan Administrasi

Mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia, kesekretariatan, keamanan dan keselamatan kerja, serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat dalam rangka menunjang pencapaian sasaran perusahaan.

5. Deputy Pemimpin Bidang Perencanaan

Merumuskan rencana korporat distribusi, pengembangan sistem distribusi, kebutuhan investasi, penyajian data dan informasi, serta melaksanakan analisis dan evaluasi kerja distribusi.

6. Deputy Pemimpin Bidang Pengusahaan.

Merencanakan, mengendalikan, membina pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik, pelayanan kepada calon pelanggan/ pelanggan dan listrik pedesaan dalam rangka peningkatan penjualan tenaga listrik secara optimal.

7. Pemeriksa Perbekalan

Memeriksa, mengecek, dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan atas realisasi pelaksanaan pekerjaan di bidang perbekalan, untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan yang terjadi atau yang akan terjadi.

8. Pemeriksa Distribusi

Memeriksa, mengecek, dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan atas realisasi pelaksanaan pekerjaan di bidang teknik distribusi, untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan yang aterjadi atau akan terjadi.

9. Pemeriksa Administrasi dan Kepegawaian

Memeriksa, mengecek, dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan atas realisasi pelaksanaan pekerjaan di bidang administrasi dan kepegawaian untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan.

10. Pemeriksa Anggaran dan Keuangan.

Memeriksa, mengecek dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan atas realisasi pelaksanaan pekerjaan di bidang anggaran dan keuangan untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan.

11. Pemeriksa Pelayanan Pelanggan

Memeriksa, mengecek dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan atas realisasi pelaksanaan pekerjaan di bidang pelayanan pelanggan untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan.

3.4 Jaringan Kerja

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat terbagi lagi menjadi 15 cabang dan 1 Unit Pengatur Beban dan masing-masing cabang dan Unit Pengatur Beban tersebut dikepalai oleh seorang kepala cabang serta bertanggung-jawab langsung kepada Pemimpin Distribusi.

Ke 15 cabang dan 1 unit pengatur beban tersebut yaitu ;

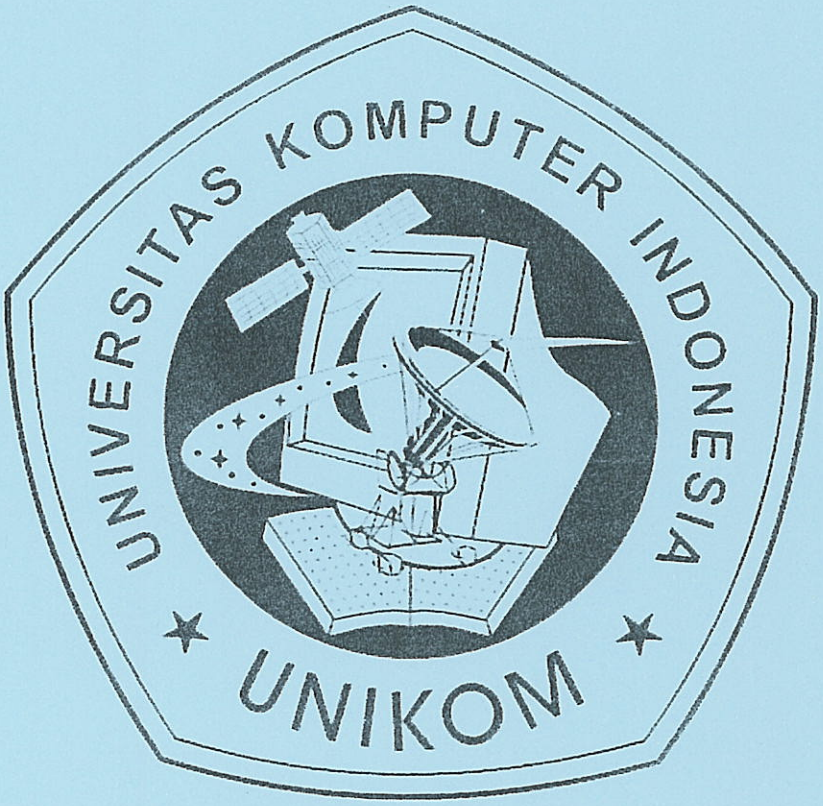
1. Cabang Cirebon
2. Cabang Garut
3. Cabang Tasikmalaya
4. Cabang Cianjur
9. Cabang Sukabumi
10. Cabang Majalaya
11. Cabang Purwakarta
12. Cabang Bekasi

5. Cabang Bogor
6. Cabang Cimahi
7. Cabang Banten
8. Cabang Bandung
13. Cabang Depok
14. Cabang Karawang
15. Cabang Sumedang
16. Unit Pengatur Distribusi.

Berkembangnya daerah pengusahaan kelistrikan dan perlunya peningkatan pelayanan kepada konsumen, menuntut bertambahnya kebutuhan akan sumber daya manusia di perusahaan. Namun dengan segala keterbatasannya, PLN belum dapat memenuhi semua kebutuhan SDM itu sendiri, untuk tetap memenuhi semua kebutuhan tersebut maka dijalin kerjasama dengan pihak lain. Sebagai realisasi dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978 yang memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Pengembangan dan Pembinaan terhadap KUD, maka PLN merasa perlu untuk menjalin kerjasama dengan KUD.

Kerjasama ini dilandasi oleh Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi No. 755/Kpts/M/Pertambangan/1979 tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) di bidang kelistrikan dan Penyaluran Minyak Tanah tertanggal 9 Oktober 1979. Di lingkungan PLN, dengan adanya keputusan bersama ini kemudian lebih dipertegas dengan keluarnya Pedoman dan Petunjuk dari Direksi PLN No. D.III.304/DIR/1980 tanggal 7 Mei 1980 tentang petunjuk Pembinaan KUD sehingga realisasi dari kerjasama tersebut dapat lebih mantap.

Sebagai tindak lanjut dari SK bersama dua Menteri maupun Pedoman dan Petunjuk Direksi PLN di atas. Maka PLN Merintis kerjasama dengan pihak Koperasi, yaitu dengan mengadakan kontrak pendekatan/penjajagan dengan kantor Koperasi Wilayah/Pemda di wilayah tingkat Propinsi maupun di tingkat II Kabupaten, tentang kemungkinan untuk dapat bekerjasama di bidang pengelolaan ketenagalistrikan khususnya di pedesaan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM